

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Ch. Haryanto, I. E. (2021). Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado.
- Alisa Dwi Sugiarti, G. T. (2023). Comparison of Income Tax Calculations for Individual Taxpayers With PKP of More Than 5 billion Based on Law Number 36 of 2008 and Law Number 7 of 2021. *Jurnal Ilmu Akuntansi*.
- Angelina B. Warokka, I. E. (2023). Analisis Perhitungan, Pemungutan, Dan Pelaporan PPH 21 Pegawai Tetap Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Arianty, F. (2022). Analisis Perubahan Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Ditinjau Dari Azas Keadilan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Vol. 5.
- CR-27. (2021, Desember). *Melihat Kembali Urgensi Lahirnya UU HPP*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-urgensi-lahirnya-uu-hpp-lt61aa06bfb31d3/>
- Fitriandi, B. P. (2022, March). *Kemenkeu Learning Center*. Retrieved from PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 TAHUN 2022 DENGAN EXCEL: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/penghitungan-pph-pasal-21-tahun-2022-dengan-excel-9842d2b9/detail/>
- Gadis Pramudita, A. O. (2021). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum dan sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*.
- Gilang Fachrizal Rachman, U. P. (2023). Penerapan Perhitungan PPH 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021. *Tera Ilmu Akuntansi*.
- I Ketut Arya Putra Aditya, L. K. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 12 No. 1 Hal. 791-801.
- Kementerian Keuangan. (2021, November). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-wak>

- Kementerian Keuangan. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, D. J. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 . *Tentang Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya.
- Masdar, N. A. (2023). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Pegawai Tetap Pada Perumda Air Minum Kota Makassar. *Journal of Business Technology, & Social Science*.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta.
- Relly Vivianda, P. I. (2023). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.
- Tambunan, A. H. (2023, Juli 18). *Mengenal Subjek Pajak PPh*. Retrieved from BELAJAR PAJAK: <https://www.pajakku.com/read/63649959b577d80e80788534/Mengenal-Subjek-Pajak-PPh-#heading-2>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. (2000). *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. (2008). *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991. (1991). *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. (2021). *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Vissaro, D. (2021, Juli). *REVISI UU HPP*. Retrieved from Ini Alasan Perlunya Tambahan Tax Bracket PPh Orang Pribadi: <https://news.ddtc.co.id/ini-alasan-perlunya-tambahan-tax-bracket-pph-orang-pribadi->

31070#:~:text=Penambahan%20tax%20bracket%20baru%20juga,bentuk%20perwujudan%20fungsi%20distribusi%20pendapatan.